

PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tititn Herningsi Sao

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
titinherningsisao2000@gmail.com

Titiek Rachmawati

titiekrachmawati@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This study aims to empirical evidence whether the implementation of performance-based budgeting affects the performance accountability of Surabaya city government agencies, this study uses four variables, namely: budget planning, budget execution, budget accountability reporting and performance evaluation. This type of research is quantitative research in the form of survey research. The population in this study was Regional Apparatus Organizations (OPD) in the city of Surabaya with purposive sampling method and the samples taken were 63 people from 22 Regional Apparatus Organizations (OPD) consisting of the Head of Agency/Department/Agency, Secretary/Head of Division/Head of Sub-dept. / Head of Subdivision / Head of Subdivision / Head of Section and other staff. These results show that the variables of Budget Planning and Budget Accountability Reporting have no effect on the Performance Accountability of Government Agencies, while Budget Execution and Performance Evaluation have a positive and significant impact on the Performance Accountability of Government Agencies.

Keywords: *budget planning, budget execution, budget accountability reporting, performance evaluation, and performance accountability.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk bukti empiris apakah penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota surabaya, penelitian ini menggunakan empat variabel yaitu: perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dalam bentuk penelitian survei. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kota Surabaya dengan metode purposive sampling dan sampel yang diambil adalah 63 orang dari 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari Kepala Badan/Dinas/Instansi, Sekertaris/Kabid/Kabag, Kasubid/ Kasubbag/Kasubdis/Kasie dan Staf-sataf lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel perencanaan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sedangkan pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kata kunci: perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran, evaluasi kinerja, dan akuntabilitas kinerja.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU No.23/2014) tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (UU No.33/2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Hal tersebut dapat terpenuhi dengan menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Kuangan Negara Pasal 19 (1) dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan membangun sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan anggaran berbasis kinerja (ABK). Anggaran merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh publik untuk dievaluasi, dikritik dan diberi masukan untuk meningkatkan instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja pemerintah yaitu perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi dan misi pemerintah yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja tersebut di samping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis dapat dilihat sebagai suatu sistem lacak performansi masing-masing unit organisasi di pemerintah yang merupakan langkah awal untuk pengendalian fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh.

Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dikeluarkan regulasi tentang perubahan pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Dalam peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap penyelenggaraan pemerintah wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja akuntansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut didiskripsikan pada seperangkat tujuan yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Pengelolaan keuangan daerah, dalam aspek operasionalnya tetap mengacu kebijakan yang dikeluarkan oleh Departemen dalam Negeri. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 129 dan 130 yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan pengelola keuangan daerah kepada pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembinaan tersebut meliputi pemberian pedoman, bimbingan, konsultasi, supervisi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Dalam menghadapi persaingan di era globalisasi, organisasi perangkat daerah dituntut untuk bekerja lebih efisien dan efektif. Persaingan yang semakin ketat menyebabkan organisasi perangkat daerah harus mampu meningkatkan daya saing dalam rangka menjaga kelangsungan hidup organisasi. Dengan situasi lingkungan yang semakin kompleks menuntut organisasi perangkat daerah untuk dapat memuaskan kepentingan stakeholder yang beraneka ragam.

Kegiatan perencanaan dan penganggaran yang melibatkan seluruh unsur pelaksana yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari perencanaan penentuan program dan kegiatan, klasifikasi belanja, penentuan standar biaya, penentuan indikator kinerja dan target kinerja, dan sampai dengan jumlah anggaran yang harus disediakan, memerlukan perhatian yang serius bagi pimpinan organisasi perangkat daerah beserta pelaksana program kegiatan. Dokumen anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Dalam buku Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2005) dinyatakan tuntutan pentingnya pelaksanaan penyusunan anggaran berbasis kinerja, ternyata membawa konsekuensi yang harus disiapkan beberapa faktor keberhasilan pelaksanaan penggunaan anggaran berbasis kinerja yaitu (1) Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi, (2) Fokus pada penyempurnaan administrasi secara terus menerus, (3) Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (biaya, waktu dan orang), (4) Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas, (5) Keinginan yang kuat untuk berhasil.

Penerapan penganggaran berbasis kinerja yang terukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Agar terciptanya akuntabilitas dalam penerapan anggaran tersebut maka diperlukan penerapan anggaran berbasis kinerja yang baik melalui empat tahapan yaitu perencanaan anggaran, penerapan anggaran, pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasinya kinerja.

Penelitian ini adalah mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran, penerapan anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada organisasi perangkat daerah kota Surabaya diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja

pemerintah pada organisasi perangkat daerah kota Surabaya serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kota Surabaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Sujarweni (2015:1) Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya. Sektor publik adalah semua yang berhubungan dengan kepentingan publik tentang penyediaan barang dan jasa yang ditujukan untuk publik, dibayarkan melalui pajak dan pendapatan negara lainnya yang sudah diatur dalam hukum.

Akuntansi sektor publik adalah proses mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menyusun laporan pengelolaan keuangan di lembaga publik. Laporan pengelolaan keuangan ini akan digunakan oleh lembaga publik untuk memberikan informasi keuangan kepada mereka yang membutuhkan. Intinya, laporan pengelolaan keuangan ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan American Accounting Association, tujuan utama akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan informasi dan laporan pengelolaan keuangan. Selanjutnya laporan ini akan digunakan untuk pengendalian manajemen dan sebagai pertanggungjawaban.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintah digunakan sebagai acuan dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan untuk tujuan umum. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan meliputi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Saldo, Beban dan Arus kas.

Perancangan Anggaran

Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan Kebijakan Umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 serta Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan Perencanaan Pembangunan Nasional serta keseragaman peraturan yang berlaku guna tercapainya tujuan bernegara dan menghindarkan dari ketimpangan antar berbagai wilayah. Ketentuan mengenai sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro atau perencanaan yang berada pada tataran kebijakan nasional atas semua fungsi pemerintahan dan meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penerapan Anggaran

Penerapan (pelaksanaan) anggaran adalah dokumen yang membuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran (Mardiasmo, 2006). penerapan (pelaksanaan) anggaran yaitu tahapan dilaksanakannya anggaran oleh semua unit kerja yang ada di dalam instansi. Untuk kepentingan pengawasan setiap atasan membuat laporan realisasi anggaran. Setelah dianalisis anggaran disampaikan pada atasan.

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka penerapan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi penerapan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penerapan

Anggaran oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan setelah Dokumen Penerapan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dengan persetujuan Sekretaris Daerah. Pelaksanaan anggaran harus: (a) Menjamin bahwa anggaran akan menerapkan sesuai dengan wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan, (b) Menyesuaikan penerapan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro, (c) Memutuskan adanya masalah yang muncul dalam penerapannya, (d) Menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Sistem penerapan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah penerapan anggaran serta memberikan fleksibilitas bagi para manajer.

Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilaksanakan secara periodik yang mencakup: (a) Laporan realisasi anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), (b) Neraca Organisasi Perangkat Daerah (OPD), (c) Catatan atas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun dan melaporkan arus kas secara periodik kepada kepala daerah, laporan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja anggaran dapat dikatakan sebagai suatu sistem dan cara penilaian pencapaian hasil kerja individu pegawai, unit kerja maupun organisasi secara keseluruhan (Mardiasmo, 2006). Tujuan dari evaluasi kinerja menurut Mangkunegara (2005) meningkatkan pengertian antara pegawai tentang persyaratan kinerja, mengakui hasil kerja seorang pegawai, memberikan peluang kepada pegawai untuk peningkatan karirnya, merumuskan sasaran masa depan sehingga pegawai termotivasi untuk berprestasi sesuai potensinya, serta melakukan pengembangan potensi pegawai.

Evaluasi kinerja adalah kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya (Mardiasmo, 2006). Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja yaitu agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

HIPOTESA PENELITIAN

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian metode kuantitatif dalam bentuk penelitian survei. Informasi yang diambil dalam penelitian ini adalah perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja

Tempat dan Waktu Penelitian

Berdasarkan dengan judul yang dipilih, penulis melakukan penelitian di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya. Waktu penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama 1 bulan yaitu pada bulan Mei-Juni 2022.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data berbentuk angka atau bilangan sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat di olah atau di analisis. Data penelitian kuantitatif dalam penelitian ini yaitu hasil dari pengisian kuesioner oleh responden yang merupakan data yang dapat di input ke dalam skala pengukuran statistik.

Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden yaitu dengan menyebar kuesioner. Sumber data penelitian ini yaitu dari penyebaran data kuesioner yang dibagikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya Di Kota Surabaya.

Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah 30 Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya yang terdiri dari 6 Badan, 6 Bagian dan 18 Dinas. Pengambilan data penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner pada setiap Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan sebagai berikut :

1. Angket (Kuesioner)

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan tertulis yang akan dijawab oleh respondennya yaitu Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa arsip atau sumber tertulis, gambar, foto yang terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya.

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data yang relevan, sumbernya bisa dari buku, artikel ilmiah ataupun lainnya terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya.

Definisi Variabel dan Definisi Operasional

Definisi Variabel

Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang disusun dengan menghubungkan pengeluaran dan hasil yang akan dicapai, mengidentifikasi input, output dan outcome yang dihasilkan oleh suatu program dan kegiatan. Penerapan anggaran berbasis kinerja berdasarkan empat variabel sebagai berikut:

Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran adalah tahap estimasi pengeluaran untuk pelaksanaan kegiatan yang harus sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan yang telah dirumuskan dalam renstra organisasi.

Penerapan Anggaran

Selama tahap penerapan, pimpinan instansi bertanggung jawab untuk memonitor pelaksanaan kegiatan, dan bagian akuntansi melakukan pencatatan atas penggunaan anggaran (input) dan outputnya dalam sistem akuntansi keuangan.

Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran

Pelaporan dalam hal ini mencakup besarnya alokasi unit kerja, besarnya anggaran yang telah dikeluarkan beserta pencapaian hasil kerja atau kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja dilakukan atas laporan kinerja, pimpinan bisa melakukan evaluasi sehingga bisa mengetahui dan menganalisis upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, manakala terjadi penyimpangan atau hambatan dalam implementasi anggaran, maka pimpinan bisa mengambil langkah atau kebijakan untuk mengatasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. penyimpangan atau hambatan tersebut.

Definisi Operasional

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Variabel penerapan anggaran berbasis kinerja dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

Perencanaan Anggaran, Penerapan Anggaran, Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran, Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

Rencana Strategik

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah.

Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.

Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu tersebut dilaksanakan oleh Aparat pengawasan intern pemerintah dan hasil reviu berupa surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat pengawasan intern pemerintah. Sedangkan evaluasi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka implementasi SAKIP di instansi pemerintah.

Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kuantitatif deskriptif yaitu mengdeskripsikan hasil data yang terkumpul apa adanya melalui ukuran-ukuran statistik seperti mean, median, modus dan standar deviasi. Alat uji dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan SPSS. Kuesioner yang sudah diisi oleh responden akan ditabulasi terlebih dahulu dalam bentuk tabel. Adapun Uji Hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Analisis Data

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ini merupakan analisis yang mengemukakan tentang data diri responden, yang diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner. Kemudian data yang diperoleh dari jawaban responden atas pernyataan yang diajukan, selanjutnya dihitung persentasenya (Nugroho, 2011)

Uji Kualitas Data

Uji kualitas data bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keakuratan dari data yang dikumpulkan. Data yang terkumpul akan diuji kualitas datanya dengan dua pengujian sebagai berikut :

Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan melakukan korelasi *bilvariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Cara menghitung korelasi *bilvariate* sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n\sum_{xy} - \sum_x \sum_y}{\sqrt{n\sum x^2 - (n\sum y^2 - \sum y^2)}}$$

Keterangan :

r_{xy} : koefisien korelasi variabel bebas dan variabel terikat

n : banyaknya sampel

$\sum x$: skor tiap item

$\sum y$: skor total variabel

r_{xy} : koefisien korelasi yang semakin besar mendekati angka 1 (satu) berarti memiliki korelasi yang semakin kuat.

Uji Reabilitas

Suatu kuisisioner bisa dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas dari variabel dapat dikatakan baik apabila nilai cronbachs alpha atau koefisien alpha > 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi kalsik merupakan salah satu uji yang digunakan untuk persyaratan statisttik. Dalam penelitian ini ada beberapa uji asumsi klasik yang digunakan sebagai berikut:

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah grafik histogram dan kurva penyebaran P-Plot.

Uji Miltikolinieritas

Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Data dapat dikatakan tidak mengalami multikolinieritas apabila nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10.

Uji Heteroskedastisitas

Tujuan Uji Heteroskedastisitas yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan lainnya. Model regresi yang baik yaitu yang homokedasitas. Ada tau tidaknya hetroskedastisitas dapat dilihat dari grafik *plot (scatterplot)*. Berikut data analisis yang digunakan yaitu Diindikasikan terjadi heteroskedastisitas, jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) dan Diindikasikan tidak terjadi heteroskedastitas, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) padasumbu Y.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Uji R²

Koefisien determinasi atau R² merupakan kontribusi variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel perubahan pada variabel tergantungnya. R² memiliki nilai antara 0-1, semakin mendekati satu menunjukkan pengaruh yang semakin kuat, sedangkan semakin mendekati 0 berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat semakin lemah.

Uji F

Uji F digunakan mengetahui apakah model regresi layak digunakan atau tidak, kelayakan tersebut dapat dilihat dari tingkat signifikansinya. Adapun kriteria pengujian secara simultan dengan tingkat signifikan $\alpha = 0.05$ atau 5% yaitu : (a) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ artinya variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. (b) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ artinya variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen.

Uji t

Uji t digunakan untuk pengujian secara parsial dengan tingkat $\alpha = 0,05$ atau 5% yaitu: (a) Jika nilai signifikansi uji t $< 0,05$ artinya H₀ ditolak dan H₁ diterima, yang artinya terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. , (b) Jika nilai signifikansi uji t $> 0,05$ artinya H₀ diterima dan H₁ ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Deskriptif

Analisis statistik deskriptif berfungsi memberi gambaran data berdasarkan nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum dari masing masing variabel penelitian. Hasil analisis statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS dari variabel-variabel penelitian.

Tabel 4.7
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N		Maximum	Mean	Std. Deviation
PA	63	14	50	42.57	5.964
PLA	63	3	15	12.73	1.961
PJA	63	9	15	12.78	1.764
EK	63	9	15	12.62	1.549
AKIP	63	22	50	42.33	5.705
Valid N (listwise)	63				

Sumber: Hasil Output SPSS, 2021

Berdasarkan dari hasil statistic deskriptif dapat dilihat dari pengolahan data pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa didalam penelitian ini terdapat 63 data pengamatan yang digunakan, dengan rincian variabel independent dan variabel dependen sebagai berikut :

Perencanaa Anggaran

Berdasarkan pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai minimum pada perencanaan anggaran sebesar 14, sedangkan nilai maksimum perencanaan anggaran sebesar 50. Untuk nilai rata-rata (*mean*) pada perencanaan anggaran sebesar 42,57.

Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai minimum pada pelaksanaan anggaran sebesar 3, sedangkan nilai maksimum pelaksanaan anggaran sebesar 15. Untuk nilai rata-rata (*mean*) pada pelaksanaan anggaran sebesar 12,73.

Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran

Berdasarkan pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai minimum pada pelaporan pertanggungjawaban anggaran sebesar 9, sedangkan nilai maksimum pelaporan pertanggungjawaban anggaran sebesar 15. Untuk nilai rata-rata (*mean*) pada pelaporan pertanggungjawaban anggaran sebesar 12,78.

Evaluasi Kinerja

Berdasarkan pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai minimum pada evaluasi kinerja sebesar 9, sedangkan nilai maksimum evaluasi kinerja sebesar 15. Untuk nilai rata-rata (*mean*) pada evaluasi kinerja sebesar 12,62.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai minimum pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 22, sedangkan nilai maksimum akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 50. Untuk nilai rata-rata (*mean*) pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 42,33.

Uji Validitas

Pengukuran uji validitas dapat diketahui dengan menggunakan koefisien korelasi yaitu yang nilai signifikannya $< 0,05$ atau $< 5\%$ (*level of signification*) yang menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut valid. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti dari 63 responden yang diolah dengan menggunakan program SPSS dapat diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Signifikansi	Kesimpulan
Perencanaan Anggaran	PA1	0,808	0.000	Valid
	PA2	0.890	0.000	Valid
	PA3	0.828	0.000	Valid
	PA4	0,883	0.000	Valid
	PA5	0,897	0.000	Valid
	PA6	0,823	0.000	Valid
	PA7	0,776	0.000	Valid
	PA8	0,910	0.000	Valid
	PA9	0,851	0.000	Valid
	PA10	0,874	0.000	Valid
Pelaksanaan Anggaran	PLA1	0,947	0.000	Valid
	PLA2	0,932	0.000	Valid
	PLA3	0,943	0.000	Valid
Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran	PJA1	0,874	0.000	Valid
	PJA2	0,901	0.000	Valid
	PJA3	0,997	0.000	Valid
Evaluasi Kinerja	EK1	0,913	0.000	Valid
	EK2	0,880	0.000	Valid
	EK3	0,826	0.000	Valid
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	AKIP1	0,870	0.000	Valid
	AKIP2	0,803	0.000	Valid

	AKIP3	0,834	0.000	Valid
	AKIP4	0,816	0.000	Valid
	AKIP5	0,885	0.000	Valid
	AKIP6	0,937	0.000	Valid
	AKIP7	0,884	0.000	Valid
	AKIP8	0,913	0.000	Valid
	AKIP9	0,819	0.000	Valid
	AKIP10	0,824	0.000	Valid

Sumber: Hasil Output SPSS, 2021

Berdasarkan pada Tabel 4.8 diatas, hasil menunjukkan bahwa nilai signifikan masing-masing pernyataan pada variabel Perencanaan Anggaran (PA), Pelaksanaan Anggaran (PLA), Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran (PJA), Evaluasi Anggaran (EK) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah 0,000 dan tidak ada yang lebih dari 0,05 atau 5 % sehingga variabel Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran, Evaluasi Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dinyatakan valid

Uji Reliabilitas

Suatu kuisioner bisa dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas dari variabel dapat dikatakan baik apabila nilai *cronbach's alpha* > 0,60 menunjukkan bahwa instrument penelitian reliabel. Hasil pengujian reabilitas pada di lihat pada Tabel 4.9 Sebagai berikut :

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Perencanaan Anggaran (PA)	0,958	Reliabel
Pelaksanaan Anggaran (PLA)	0,935	Reliabel
Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran (PJA)	0,867	Reliabel
Evaluasi Kinerja (EK)	0,831	Reliabel
Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	0,959	Reliabel

Sumber: Hasil Output SPSS, 2021

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dilihat nilai *cronbach's alpha* perencanaan anggaran (PA), pelaksanaan anggaran (PLA), pelaporan pertanggungjawaban anggaran (PJA), evaluasi kinerja (EK) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) menunjukkan >0,6 maka seluruh variabel tersebut dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian uji normalitas yang digunakan adalah *grafik normal probability-plot* dan *Kolmogorov-smirnov (1-sampel K-S)*. Grafik Normal P-Plot berdistribusi normal apabila mendekati dan searah dengan garis diagonal. Sedangkan data *Kolmogorov-smirnov (K-S)* akan terdistribusi normal jika nilai signifikan > 0,05. Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan uji statistik *1-sampel K-S* pada Tabel 4.10 sebagai berikut :

Tabel 4.10
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	63

Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.17529504
Most Extreme Differences	Absolute	.165
	Positive	.165
	Negative	-.157
Kolmogorov-Smirnov Z		1.309
Asymp. Sig. (2-tailed)		.065

a. Test distribution is Normal.

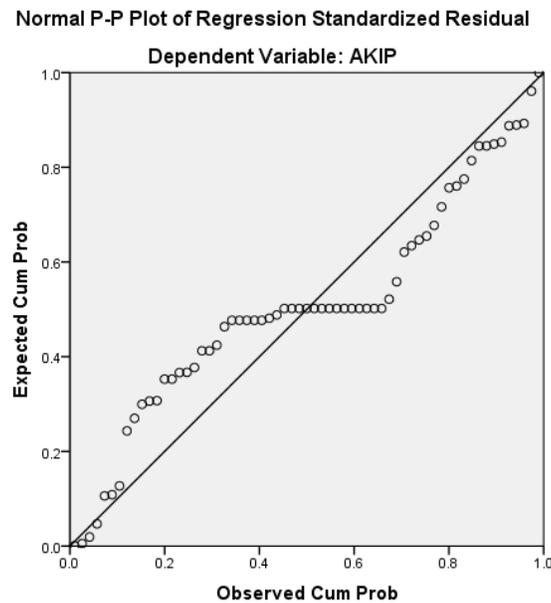
b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Output SPSS, 2021

Berdasarkan Tabel 4.10 diatas menunjukan bahwa hasil pengujian menggunakan *Kolmogorov-smirnov* bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,065. Hal ini sesuai dengan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan data tersebut didistribusi normal dan layak digunakan dalam penelitian.

Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan Grafik Normal P-Plot pada Gambar 4.1 sebagai berikut :

Gambar 4.1 Uji Normalitas dengan Grafik Normal P-Plot



Berdasarkan Gambar 4.1 terlihat bahwa data hasil uji normalitas dengan Grafik Normal P-Plot menunjukan data (titik-titik) berada searah dan menyebar mengikuti garis diagonal, hal tersebut menunjukan data terdistribusi normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas dan layak untuk digunakan.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Data dapat dikatakan tidak mengalami multikolinieritas apabila nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Hasil dari uji multikolineartias dapat dilihat pada Tabel 4.11 sebagai berikut :

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		

PA	.246	4.072
PLA	.282	3.541
PJA	.370	2.703
EK	.425	2.355

a. Dependent Variable: AKIP

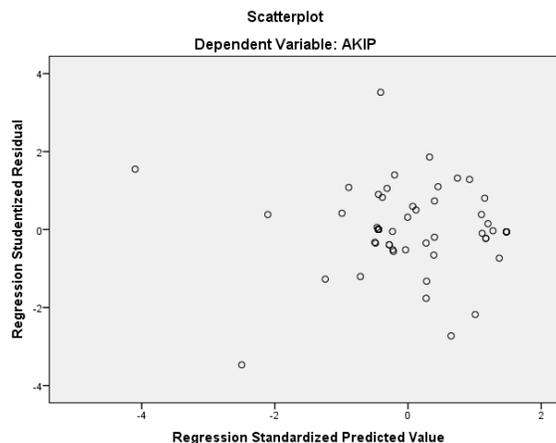
Sumber: Hasil Output SPSS, 2021

Berdasarkan Tabel 4.11 hasil pengujian dengan Uji Multikolinearitas dapat diketahui bahwa seluruh variabel independent yaitu Perencanaan Anggaran (PA), Pelaksanaan Anggaran (PLA), Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran (PJA) dan Evaluasi Kinerja (EK) memiliki nilai *tolerance* > 0,01 dan nilai VIF < 10. Dalam hal ini disimpulkan tidak terjadi adanya Multikolinearitas antara variabel dan dapat dikatakan layak untuk digunakan.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *Variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residualnya memiliki varian yang sama disebut homoskedastisitas dan jika varian tidak sama maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas dengan Grafik Plot (Scatterplot)



Berdasarkan Gambar 4.2 menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang teratur dan jelas serta menyebar secara acak, dan dapat dilihat pada Gambar 4.2 titik-titik tersebar berada diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi pada penelitian ini bebas dari masalah heteroskedastisitas atau terjadi heteroskedastisitas.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier sederhana digunakan dalam hipotesis ini untuk menguji seberapa jauh variabel penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Data yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden, dan diolah menggunakan menggunakan SPSS dengan menggunakan hasil perhitungan seperti Tabel 4.12 dibawah ini :

Tabel 4.12 Hasil Uji Analisis Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std.	Beta		

		Error			
1 (Constant)	-.569	2.442		-.233	.816
PA	.172	.097	.180	1.781	.080
PLA	1.063	.274	.365	3.880	.000
PJA	.283	.266	.087	1.062	.293
EK	1.460	.283	.397	5.162	.000

a. Dependent Variable: AKIP

Sumber: Hasil Output SPSS, 2021

Berdasarkan Tabel 4.12 maka prediksi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dimasukkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$AKIP = 0,569 + 0,172PA + 1,063PLA + 0,283PJA + 1,460EK + e$$

Keterangan:

AKIP : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

PA : Perencanaan Anggaran

PLA : Pelaksanaan Anggaran

PJA : Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran

EK : Evaluasi Kinerja

e : error

Dari persamaan regresi yang didapat menunjukkan variabel perencanaan anggaran (PA), pelaksanaan anggaran (PLA), laporan pertanggungjawaban anggaran (PJA) dan evaluasi kinerja (EK) memiliki koefisien yang positif. Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Koefisien PA = 0,172 menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran (PA) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan kata lain, jika variabel perencanaan anggaran (PA) meningkat sebesar satu satuan, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat sebesar 0,172 satuan
2. Koefisien PLA = 1,063 menunjukkan bahwa variabel pelaksanaan anggaran (PLA) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan kata lain, jika variabel pelaksanaan anggaran (PLA) semakin meningkat sebesar 1,063 satuan.
3. Koefisien PJA = 0,283 menunjukkan bahwa variabel pertanggungjawaban anggaran (PJA) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. dengan kata lain, jika variabel pertanggungjawaban anggaran (PJA) meningkat sebesar satu satuan, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat sebesar 0,283 satuan.
4. Koefisien EK = 1,460 menunjukkan bahwa variabel evaluasi kinerja (EK) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan kata lain, jika variabel pelaksanaan anggaran (PLA) semakin meningkat sebesar 1,460 satuan.

Uji R²

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinan adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2011). Pada Tabel 4.13 hasil dari uji koefisien determinasi:

Tabel 4.13
Hasil Uji R²

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.924 ^a	.855	.845

a. Predictors: (Constant), EK, PLA, PJA, PA

b. Dependent Variable: AKIP

Sumber: Hasil Output SPSS, 2021

Berdasarkan hasil Uji Koefisien Determinasi pada Tabel 4.13 menunjukkan R Square (R²) yang diperoleh pada penelitian ini yaitu sebesar 0,855 atau 85,5% yang dapat diartikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dipengaruhi oleh variabel Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran dan Evaluasi Kinerja. Sisanya sebesar 14,5% ($100\% - 85,5\% = 14,5\%$) yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang diluar persamaan penelitian.

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan koefisien variabel bebas mempunyai pengaruh nyata atau tidak terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2016). uji kelayakan yang digunakan yaitu apabila menunjukkan tingkat signifikan $< 0,05$ sehingga hubungan antar variabel independent adalah signifikan dan dapat dipengaruhi variabel dependen. Dibawah ini merupakan Tabel 4.14 uji kelayakan model (Uji F) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	F	Sig.
1 Regression	85.238	.000 ^b
Residual		
Total		

a. Dependent Variable: AKIP

b. Predictors: (Constant), EK, PLA, PJA, PA

Sumber: Hasil Output SPSS, 2021

Berdasarkan Tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 85,238 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau $< 0,05$ sehingga model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak dan dapat memenuhi kriteria uji kelayakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independent secara masing-masing berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji t

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independent secara individual mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (terikat). Berikut hasil Uji t sebagai berikut :

Tabel 4.15
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.569	2.442		-.233	.816
PA	.172	.097	.180	1.781	.080
PLA	1.063	.274	.365	3.880	.000
PJA	.283	.266	.087	1.062	.293
EK	1.460	.283	.397	5.162	.000

a. Dependent Variable: AKIP

Sumber: Hasil Output SPSS, 2021

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.15 maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari hasil uji t pada Tabel 4.15 menunjukkan bahwa Perencanaan Anggaran memiliki nilai signifikansi sebesar 0,080 dengan nilai t hitung sebesar 1,781. Hal tersebut berarti nilai signifikansi $0,080 >$ tingkat

kesalahan yang dapat diterima yaitu 0,05 atau (0,080 > 0,05) yang menunjukkan bahwa variabel Perencanaan Anggaran tidak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sehingga pada penelitian ini H1 yang menyatakan Perencanaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari hasil uji t pada Tabel 4.15 menunjukkan bahwa Pelaksanaan Anggaran memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai t hitung sebesar 3,880. Hal tersebut berarti nilai signifikansi 0,000 < tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 0,05 atau (0,000 < 0,05) yang menunjukkan bahwa variabel Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sehingga pada penelitian ini H2 yang menyatakan Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengaruh Pelaporan Pertanggungjawaban terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari hasil uji t pada Tabel 4.13 menunjukkan bahwa Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran memiliki nilai signifikansi sebesar 0,293 dengan nilai t hitung sebesar 1,062. Hal tersebut berarti nilai signifikansi 0,293 > tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 0,05 atau (0,293 > 0,05) yang menunjukkan bahwa variabel Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sehingga pada penelitian ini H3 yang menyatakan Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengaruh Evaluasi Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari hasil uji t pada Tabel 4.13 menunjukkan bahwa Evaluasi Kinerja memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai t hitung sebesar 5,162. Hal tersebut berarti nilai signifikansi 0,000 < tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 0,05 atau (0,000 < 0,05) yang menunjukkan bahwa variabel Evaluasi Kinerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sehingga pada penelitian ini H4 yang menyatakan Perencanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pembahasan

Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.13 yang telah dilakukan antara perencanaan anggaran sebagai PA menunjukkan bahwa t hitung sebesar 1,781 dengan nilai signifikansi sebesar 0,080 sehingga dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis H1 ditolak.

Hal ini disebabkan perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan kebijakan umum APBD sampai dengan disusunnya rancangan APBD terdiri dari beberapa tahap yang belum menjamin secara efisien, efektif dan bersasaran mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional dan kegiatan perencanaan anggaran yang dilaksanakan belum sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan dalam organisasi perangkat daerah kota Surabaya.

Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.13 yang telah dilakukan antara implementasi anggaran sebagai PLA menunjukkan bahwa t hitung sebesar 3,880 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis H2 diterima.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik atau besar pelaksanaan anggaran dilakukan, maka semakin besar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu dilaksanakan pelaksanaan anggaran yang baik. karena dalam hal ini pelaksanaan anggaran merupakan pondasi dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan pada sebuah organisasi atau instansi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2016) dan Muhammad Sya'Roni (2019) yang membuktikan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Pelaporan Pertanggungjawaban terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.13 yang telah dilakukan antara pertanggungjawaban anggaran sebagai PJA menunjukkan bahwa t hitung sebesar 1,062 dengan nilai signifikansi sebesar 0,292 Dari hasil

penelitian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis H3 ditolak hal ini disebabkan kurangnya pelaporan pertanggungjawaban yang mencakup besarnya alokasi unit kerja, besarnya anggaran yang telah dikeluarkan dan kegiatan atau program yang telah dilaksanakan dalam organisasi perangkat daerah kota Surabaya.

Pengaruh Evaluasi Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.13 yang telah dilakukan antara evaluasi kinerja anggaran sebagai EK menunjukkan bahwa t hitung sebesar 5,162 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.9 yang telah dilakukan antara Evaluasi Kinerja sebagai EK menunjukkan bahwa t hitung sebesar 5,162 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis H4 diterima.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik atau besar Evaluasi Kinerja dilakukan, maka semakin besar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu dilaksanakan Evaluasi Kinerja yang baik. karena dalam hal ini pelaksanaan anggaran merupakan pondasi dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan pada sebuah organisasi atau instansi

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sya'Roni (2019) yang membuktikan bahwa Evaluasi Kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian terkait Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kota Surabaya yang telah diuraikan, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perencanaan Anggaran memiliki nilai signifikansi sebesar 0,080 dengan nilai t hitung sebesar 1,781. Hal tersebut berarti nilai tidak signifikansi $0,080 >$, tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 0,05 atau $(0,080 > 0,05)$ yang menunjukkan bahwa Perencanaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Pelaksanaan Anggaran memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai t hitung sebesar 3,880. Hal tersebut berarti nilai signifikansi $0,000 <$ tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 0,05 atau $(0,000 < 0,05)$ yang menunjukkan bahwa Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran memiliki nilai signifikansi sebesar 0,293 dengan nilai t hitung sebesar 1,062. Hal tersebut berarti nilai signifikansi $0,293 >$, tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 0,05 atau $(0,293 < 0,05)$ yang menunjukkan bahwa Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Evaluasi Kinerja memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai t hitung sebesar 5,162. Hal tersebut berarti nilai signifikansi $0,000 <$ tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu 0,05 atau $(0,000 < 0,05)$ yang menunjukkan bahwa Perencanaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, dianjurkan meneliti pada subjek yang lain, dengan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diantaranya : penerapan akuntansi keuangan daerah, pengawasan kualitas laporan keuangan, dan kejelasan sasaran anggaran.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk ruang lingkup penelitian tidak hanya di wilayah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Surabaya, sehingga hasilnya dapat mencerminkan kondisi yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dapat digeneralisasi pada semua keadaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprila, N. 2014. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu*. *Jurnal Fairness* 4(2): 1-24.
- Indriani Yulia Friska (2015). *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi)*. <https://www.onlinejournal.unja.ac.id/jaku/article/view/2381/170>.
- J.R.Patiruhu. Stenley J.Ferdinandus Welmin Marlo Komul. 2018. Analisis Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Manajerial Aparatur Pemerintahan (studi empiris pada badan pencarian dan pertolongan). Pascasarjana Universitas pattimura.
- Ni Lu Putu Uttari Premananda, Ni Made Yenni Latrini. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kota Denpasar. Universitas Udayana (UNUD). Bali
- Prastianingrum, Kuku. (2019). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor periode 2014-2017. Skripsi. Universitas Pakuan.

- Raissa (2016) Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. <http://e-journal.uajy.ac.id/9749/>.
- Republik Indonesia. 2006. Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2007. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang *Perubahan atas Pemendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Ridwan, W. (2016). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Bogor. Skripsi. Universitas Pakuan
- Syaripuddin, satriana. 2017. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik pada Instansi Pemerintah (studi pada badan penegelolaan keuangan dan aset daerah Kota Kendari). Kendari. Universitas halu Oleo.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Wibisono, S. 2016. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5(9): 1-22